



Transformasi aktivisme digital menuju aktivisme riil: Kajian atas Garuda Biru dan unjuk rasa 22 Agustus 2024

Maria Puspitasari^{1*}

¹ *Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta, 10430, Indonesia.*

*Correspondent: puspitasari11@ui.ac.id

Received Date: June 16, 2024

Revised Date: July 16, 2024

Accepted Date: August 31, 2024

ABSTRAK

Pendahuluan: Aktivisme digital merupakan salah satu wajah demokrasi, terutama sebagai cerminan partisipasi. Media sosial dibanjiri dengan gambar Garuda Biru pada latar belakang biru tua sebagai "peringatan darurat" setelah Parlemen/DPR menolak keputusan Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus 2024. Ini adalah cerminan dari demokrasi yang sedang bergejolak dan beralih menjadi aktivisme sosial nyata, yaitu demonstrasi di gedung Parlemen pada hari berikutnya. Dalam konteks demokrasi, ini mencerminkan kesadaran dan perlawanan terhadap rencana penolakan putusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan isi pesan di media sosial tentang bagaimana netizen memaknai demokrasi. Kedua, bagaimana pemaknaan tersebut berubah menjadi aktivisme demonstrasi. **Metode:** Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dua tujuan utama penelitian ini melalui observasi teks di sejumlah akun X (Twitter) untuk periode 21-24 Agustus 2024, didukung dengan wawancara dengan dua informan ahli di bidang demokrasi dan aktivisme digital sebagai cara triangulasi data dan metode. **Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivisme digital merupakan bentuk partisipasi aktif dalam memaknai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial berfungsi sebagai saluran yang efektif untuk mengekspresikan makna dan kekecewaan terkait praktik demokrasi. Kedua, aktivisme digital dapat bertransformasi menjadi aktivisme nyata ketika terdapat sejumlah prasyarat, pertama adalah adanya kekecewaan terhadap pelemahan demokrasi. Kekecewaan yang kumulatif menjadi pendorong aktivisme nyata, dan media sosial menjadi saluran untuk memobilisasi netizen dalam menjaga demokrasi. Selain itu, terdapat momen historis berurutan yang merugikan bangsa. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, demokrasi dimaknai sebagai kebebasan berekspresi termasuk dalam melakukan mobilisasi yang efektif untuk demonstrasi aktivisme nyata yang berdampak pada upaya menyelamatkan demokrasi dengan membatalkan rencana DPR untuk menarik keputusan MK. Perubahan dari aktivisme digital menjadi aktivisme nyata terjadi ketika ada kekecewaan dan momen historis yang menyadarkan banyak orang bahwa bangsa sedang dirugikan.

Kata Kunci: Demokrasi; aktivisme digital; aktivisme nyata; kekecewaan

ABSTRACT

Introduction: Digital activism is one of the faces of democracy, especially as a reflection of participation. Social media flooded with 'emergency warning' Garuda Biru Pictures on a navy-blue background after Parliament/House rejects Court Decision on August 21, 2024. It reflected democracy that was in turmoil and transitioning to real social activism, namely a demonstration at the Parliament. Digital activism is one of the faces of democracy, especially as a reflection of participation. Social media flooded with 'emergency warning' Garuda Biru Pictures on a navy-blue background after Parliament/House rejects Court Decision on August 21, 2024. It reflected democracy that was in turmoil and transitioning to real social activism, namely a demonstration at the House the next day. In the context of democracy, this reflects awareness and resistance of the planned the Constitutional Court's (MK) legal ruling. This study aims to reveal the content of messages on social media about how netizens interpret democracy. Second is how the interpretation turns into demonstration activism. **Methods:** A qualitative approach is used to describe the two main objectives of the study by exploring them

Cite This Article:

Puspitasari, M. (2024). Transformasi aktivisme digital menuju aktivisme riil: kajian atas Garuda Biru dan unjuk rasa 22 Agustus 2024. *Journal of National Paradigm-Based Resilience Strategy*, 1(2), 95-108. <https://doi.org/10.61511/napbres.v1i2.2024.1096>

Copyright: © 2024 by the authors. This article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



through text observations on several X Twitter accounts for the period August 21-24, 2024, supported by interviews with two informants who are experts in the field of democracy and digital activism as a way of triangulating data and methods. **Finding:** The results of the study show that digital activism is a form of active participation in interpreting democracy in daily life. Social media showed as the effective channel for expressing meaning and disappointment regarding democratic practices. Second, digital activism can transform into real activism when there are several prerequisites, first there is a disillusionment towards the weakening of democracy, Cumulative disillusionment becomes the driving force of real activism. And social media becomes a channel to mobilize netizens to move to uphold democracy in overseeing. And there is a sequential historical moment that harmed the nation. **Conclusion:** The conclusion is democracy interpreted as freedom of expression including carrying out effective mobilization for real activism demonstrations and has an impact on efforts to save democracy by cancelling the DPR's plan to withdraw the Constitutional Court's decision. The change of a digital activism into a real-tangible activism occurs when there is a disillusionment and a historical moment that makes many people aware that the nation is being harmed.

KEYWORDS: digital activism; real activism; disillusionment.

1. Pendahuluan

Demokrasi memiliki makna yang jauh lebih luas dari praktik-praktik yang tercermin melalui perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat pada saat kegiatan pemilihan kepala negara, kepala daerah ataupun anggota legislatif. Manifestasi kesadaran masyarakat bahwa demokrasi bukan terbatas pada isu-isu tersebut menampilkan wajah yang menarik pada 21 Agustus 2024. Melalui media sosial pada periode tersebut muncul serangkaian pernyataan sikap masyarakat melalui unggahan Peringatan Darurat bergambar Burung Garuda dengan latar belakang berwarna biru. (Diahwahyuningtyas & Nugroho, 2024)

Terdapat warganet dalam jumlah yang relatif besar yang mengunggah gambar dan video Garuda Biru baik di Instagram Stories maupun di platform X yang membanjiri kolom percakapan dengan gambar serupa. X menjadi penuh dengan warna Garuda Biru dengan latar belakang biru *navy* pada 21 Agustus siang hingga malam. Merujuk pada informasi yang disampaikan oleh BBC News Indonesia, video Garuda Biru pertama kali diunggah pada Rabu 21 Agustus siang di platform Instagram @indonesians dan telah dibagikan 10.000 kali. Pada dua jam berikutnya diunggah oleh akun @najwashihab dan telah dibagikan 500.000 kali. Pada kurun waktu yang kurang lebih berdekatan, sejumlah akun mengunggah pernyataan sikap Garuda Biru di platform X, seperti dilakukan oleh musisi Baskara Putra dan komika Pandji Pragiwaksono.

Dalam penelusuran yang dilakukan sejumlah media, diperoleh informasi bahwa protes peringatan darurat terpantau awal mulanya melalui akun @pundingin yang mengunggah video yang berasal dari akun *youtube* EAS Indonesia Concept. Video tersebut dibagikan satu tahun yang lalu. Video ini merupakan *emergency alert system* (EAS) yang sifatnya fiksi dan terinspirasi dari konsep di Amerika Serikat. Peringatan darurat sempat memasuki ruang TikTok, meskipun gelombang dukungannya tidak sekuat pada dua platform lainnya, Instagram dan X.

Ada apa dengan demokrasi di Indonesia hingga memunculkan gambaran kedaruratan dengan menampilkan simbol Burung Garuda berwarna biru? Unggahan tersebut tidak hanya disertai dengan narasi secara auditif yang memperkuat kesan kedaruratan tersebut melainkan juga berkaitan dengan suasana demokrasi di Indonesia.

Mengutip laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Burung Garuda memiliki pemaknaan simbolik bagi bangsa Indonesia. Burung Garuda merupakan simbol dari kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari rentang sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa. Rentang sayapnya yang mengembang lebar mengisyaratkan kesiapan untuk terbang ke angkasa, merupakan simbol yang menyiratkan makna dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. (Pusdatin BPIP, 2021)

Suatu negara dinilai demokratis ketika negara memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi segenap warganegarannya, tanpa kecuali, sehingga dapat membantu warganya agar mampu mengembangkan dirinya. Hoskyns menjelaskan bahwa demokrasi

menghadapi bentuk baru terkait dengan komunikasi, pemikiran politik dan aktivisme sosial. (Hoskyns, 2014) Dalam pernyataannya tersebut, Hoskyns menekankan bahwa negara disebut sebagai demokratis ketika mampu membuka ruang kesempatan kepada setiap warganya untuk dapat semakin berkembang melalui komunikasi, pemikiran dan aktivisme sosial. (Hoskyns, 2014)

Hoskyns di dalam tulisannya juga menunjukkan adanya beragam praktik demokratisasi yang partisipatif dan baru. Keragaman praktik demokratisasi tersebut tidak hanya mengubah ruang publik tetapi sekaligus membuka ruang kebutuhan untuk merumuskan kembali baik demokrasi maupun ruang publik. (Hoskyns, 2014)

1.1. Pengertian Demokrasi

Salah satu basis untuk memahami konsep demokrasi adalah Konvensi Internasional Hak-Hak Dasar pada tahun 1996. (Meyer, 2012) Konvensi tersebut menyebutkan ada lima kelompok hak-hak asasi yaitu hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya. (Meyer, 2012) Hak-hak sipil dan politik lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Hak sipil mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dan berkumpul, sementara hak-hak politik berkaitan dengan hak untuk membentuk partai politik dan untuk memilih. Tiga hak lainnya yaitu hak sosial, hak ekonomi dan hak budaya. Hak sosial merupakan hak atas perlindungan sosial, keamanan sosial, pendidikan, pelayanan Kesehatan. Sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pembayaran yang adil, kondisi kerja yang layak. Dan hak budaya meliputi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebudayaan suatu masyarakat dan untuk mengekspresikan identitas budaya. (Meyer, 2012)

Inti dari gagasan dalam konvensi tersebut adalah kebebasan dan kesempatan bagi pengembangan setiap individu serta partisipasi penuh dari setiap individu tanpa kecuali, yang dijamin oleh negara. Apa yang disampaikan dalam konvensi ini menegaskan apa yang dikatakan David Held bahwa demokrasi menciptakan peluang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan. (Held, 2006)

Elemen fundamental demokrasi sosial adalah ranah politik diskursus publik yang terbuka yang ditandai dengan kebebasan pers dan kebebasan dalam mengekspresikan pendapat bagi setiap warga negara. (Meyer, 2012) Ranah publik yang dibangun dalam beraneka kanal, salah satunya adalah media sosial memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu memberikan informasi dan argumentasi bagi individu, serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk meraih kesepakatan mengenai nilai-nilai yang memengaruhi kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini menurut Meyer, masyarakat sipil dituntut untuk memiliki kebebasan, beragam suaranya dan berperan aktif dalam membentuk basis demokrasi yang kuat dan efektif. (Meyer, 2012)

Senada dengan Meyer, demokrasi menurut Papacharisi haruslah dapat memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk setara, memiliki kebebasan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang memiliki orientasi pada kepentingan bersama. (Papacharissi, 2010) Pada titik ini kita melihat titik kesepahaman antara Meyer, Held dan Papacharisi mengenai dua elemen esensial dalam praktik demokrasi yaitu inklusi sosial dan partisipasi.

1.2. Aktivisme sosial dalam media sosial

Dalam mengekspresikan gagasan, salah satu kanal yang menjadi bagian dari terbukanya ranah publik adalah media sosial. Perkembangan media sosial seturut dengan perkembangan teknologi internet mengubah konsep dan pemahaman demokrasi di mata warga. Aktivisme sosial yang terjadi dalam ruang media sosial menjadi bentuk aktivisme yang menunjukkan gejala perubahan menarik. Survei yang dilakukan Tim IDN Media kepada 300 Gen Z untuk mengetahui perspektif mereka terkait pandangan mereka mengenai lanskap politik Indonesia, ditemukan bahwa saat ini di kalangan Gen Z terdapat hanya 1,7 % yang mengatakan bahwa mereka puas dengan demokrasi di negara ini.

Selebihnya yaitu, 15% mengatakan bahwa mereka sangat tidak puas, 59% mengatakan bahwa mereka merasa kualitas demokrasi kurang, 24,3% mengatakan mereka cukup puas.

Ketidakpuasan generasi Z pada praktik demokrasi di Indonesia nampaknya bukan hanya merupakan sikap dan perasaan yang dialami hanya oleh mereka saja, melainkan merupakan situasi yang juga dirasakan di sejumlah negara. Di sejumlah negara-negara demokrasi bahkan menggunakan paksaan terbuka terhadap para pelaku aktivisme digital. Catatan Earl, Maher & Pan (2022) menunjukkan beberapa kasus, diantaranya bahwa polisi Inggris telah memantau media sosial untuk melakukan penangkapan pendahuluan sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, sedangkan di Amerika Serikat, FBI atau Biro Investigasi Federal telah menggunakan kiriman Twitter untuk melegitimasi tindakan penggerebekan di rumah-rumah aktivis. (Earl et al., 2022)

Tren lain yang ditunjukkan oleh Earl et.al adalah adanya aktor swasta yang dilibatkan, termasuk individu, kelompok, dan/atau perusahaan swasta, yang berkolaborasi dengan negara-negara bangsa. Negara-negara seperti Arab Saudi bahkan telah membuat kontrak dengan aktor swasta untuk mengawasi dan menyerang aktivis, pembangkang, dan jurnalis yang tinggal di luar perbatasannya. Begitupula para pendukung rezim di Iran telah melakukan tindakan menyerang para kritikus daring. (Earl et al., 2022)

Dengan demikian, praktik demokrasi secara global berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, karena adanya argumentasi tentang pentingnya menjaga keamanan nasional. Dalam situasi sedemikian, maka praktik demokrasi yang menghadirkan aktivisme digital juga berhadapan dengan kemungkinan bahwa gagasan yang mereka ekspresikan tidak membuahkan hasil yang positif melainkan mengecewakan.

Kekecewaan terhadap demokrasi di kalangan Gen Z Indonesia memuncak selama satu tahun terakhir, setidaknya sebagaimana dapat diidentifikasi dalam paparan hasil penelitian yang dilakukan tim IDN Media. Kekecewaan tersebut dijelaskan kemunculannya karena adanya persepsi tentang kurangnya kemajuan dalam pemberantasan korupsi, yang dalam beberapa kasus melibatkan pejabat pemerintah, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri Sosial Juliani Batubara.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 yang dirilis Transparency International pada masa awal tahun 2023 menyampaikan data bahwa Indonesia memperoleh skor 34, posisi ke-110 dari 180 negara yang disurvei. IPK merupakan alat ukur komprehensif yang digunakan untuk menilai persepsi korupsi sektor publik pada skala mulai dari nol hingga seratus. (IDN Research Institute, 2024) Angka nol mencerminkan nilai korupsi yang tinggi, dan mendekati seratus mencerminkan lingkungan yang sangat bersih. Bandingkan dengan skor Indonesia pada tahun 2021 adalah 38.

Sementara pada indikator *Political Risk Service* (PRS) dari *International Country Risk Guide*, turun secara signifikan dari 48 poin pada tahun 2021 menjadi 35 poin pada tahun 2022. Indikator ini mengukur korupsi sistem politik, konflik kepentingan di antara politisi dan tokoh bisnis, serta maraknya pembayaran ekstra atau suap terkait izin ekspor-impor. (IDN Research Institute, 2024)

Di sisi lain, temuan dalam penelitian IDN Research Report menunjukkan bahwa supremasi hukum menjadi perhatian dan sekaligus elemen yang diharapkan oleh generasi Z untuk tercipta di Indonesia. (IDN Research Institute, 2024)

Paparan hasil survey di atas berkaitan dengan generasi Z memberikan gambaran bagaimana mereka memaknai demokrasi dan merasakan kekecewaan dalam ruang publik terkait dengan partisipasi. Hal tersebut menjadi daya dorong bagi mereka untuk mengekspresikan gagasan dan kegelisahan mereka dalam ranah publik, terutama dalam kanal-kanal media sosial.

Dalam analisis yang muncul dalam Laporan hasil survey disebutkan bahwa generasi milenial dan Gen Z Indonesia merupakan bagian penting yang memiliki rasa haus akan informasi yang tidak terpuaskan, sehingga mereka terdorong untuk secara aktif membentuk lanskap politik yang baru melalui tindakan partisipasi mereka dalam ruang media sosial. Media daring dan media sosial semakin berperan dalam pengambilan keputusan di kalangan anak muda, termasuk dalam keputusan politik sebagaimana

ditemukan dalam survey tersebut, dan dikuatkan oleh Uni Lubis dalam wawancara dengan Tim IDN Media.

Maka geliat kaum muda dalam mengekspresikan gagasannya terkait dengan suasana pelemahan demokrasi yang mereka rasakan menjadi warna yang menarik untuk dicermati kecenderungannya, apakah memberikan optimisme baru atau hanya sekedar bagian dari ilusi demokrasi?

Aktivisme sosial yang terjadi pada 22 Agustus 2024 dan berpusat di sekitar Gedung DPR merupakan penanda yang semakin menguatkan pemanfaatan internet yang menjadi instrumen ampuh yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat dan mendorong terjadinya perubahan sosial. Aktivisme warga yang memuncak dalam media sosial pada satu hari sebelumnya, mampu memunculkan gerakan sosial berupa aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa di sejumlah kota, baik Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Ketika aktivisme di ruang media sosial memuncak menjadi sebetuk aktivisme sosial yang secara fisik menggedor-gedor pintu demokrasi di Gedung DPR RI dan jantung kesadaran sebagian masyarakat kita, mengundang kita untuk mengkaji kembali, bagaimana pesan diformulasi dan dimaknai oleh warganet, sehingga menjadi instrumen bagi perubahan sosial.

Demokrasi yang dilandasi oleh kekuatan masyarakat sipil yang bebas, beragam, dan aktif ditandai dengan adanya akses dan partisipasi kepada setiap individu yang ada dalam sebuah struktur sosial. Dan akses serta partisipasi tersebut dijamin oleh penyelenggara pemerintahan, sehingga setiap individu tanpa kecuali mendapatkan haknya secara setara untuk dapat mengakses dan berpartisipasi dalam ruang publik.

Platform digital telah membuka jalan baru masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam masalah politik dan kemasyarakatan, sehingga memberikan pengaruh pada perubahan dalam wajah demokrasi global. Teknologi informasi mengubah relasi antar individu yang tidak lagi terbatas pada relasi fisik melainkan juga relasi *interface* yang hadir melalui kehadiran teknologi informasi. (Holmes, 2005) Perubahan ini membawa konsekuensi pada terbukanya ruang publik dalam ruang virtual di media sosial.

Papacharissi menjelaskan bahwa internet dapat mendorong dan mewujudkan terciptanya demokratisasi. (Papacharissi, 2010) Dan gejala ini semakin nampak kuat dalam aktivisme daring yang memperluas keterlibatan masyarakat untuk terlibat dalam politik. (Dahlberg, 2001) Platform media sosial semakin kuat dalam memainkan peran penting memfasilitasi hubungan di antara warga negara yang memiliki pemikiran yang sama, memungkinkan penyebaran sudut pandang mereka, dan mendorong publik untuk terlibat dalam mendiskusikan isu-isu politik dan kemasyarakatan yang kritis

Sejak peristiwa yang dikenal sebagai *Arab Spring* atau Musim Semi Arab, serangkaian pemberontakan pro-demokrasi melanda beberapa negara di jazirah Arab, termasuk Tunisia, Mesir, Libya, dan lain-lain pada tahun 2011, ketika media sosial seperti Facebook dan Twitter memainkan peran penting dalam memobilisasi pengunjung rasa sekaligus menyebarkan informasi, dan mengkoordinasi tindakan kolektif. (Gadi et al., 2013; Goodwin, 2011; Khondker, 2011)

Gerakan Indonesia Darurat Garuda Biru yang muncul melalui media sosial pada tanggal 21 Agustus 2024 dan memuncak menjadi aksi unjuk rasa yang terjadi secara spontan pada satu hari berikutnya memunculkan pertanyaan yang tidak sedikit di kalangan masyarakat. Bagaimana sebuah aktivisme di dalam ruang media sosial dapat menggerakkan aktivisme yang bersifat fisik dan terjadi di sejumlah kota? Penelitian ini dilakukan pada dua tataran, yaitu pertama mencermati isi media sosial, terutama X, lalu pada tataran berikutnya melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki perhatian kepada isu demokrasi dan aktivisme dalam ruang digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasari pada pengumpulan data berupa observasi pada teks di media sosial. Data primer terdiri dari data hasil

observasi pada akun-akun di platform X, dan data sekunder bersumber dari akun-akun di platform Instagram dalam kurun waktu 21 hingga 24 Agustus.

Selain itu data primer lainnya memanfaatkan wawancara kepada dua orang narasumber yang memiliki perhatian pada isu demokrasi dan aktivisme sosial dalam ruang digital, yaitu Damar Juniarto dan Ignatius Haryanto. Melalui data yang terkumpul dengan memanfaatkan data primer berupa hasil wawancara dan observasi teks serta data sekunder berupa pemberitaan di media massa mengenai aksi unjuk rasa 22 Agustus 2024, peneliti melakukan triangulasi data untuk mendapatkan analisis yang memiliki kualitas data kuat.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Aktivisme daring dalam kronologi peristiwa

Aktivisme daring yang terjadi pada 21 Agustus 2024 bersumber dari kegelisahan masyarakat akan kondisi demokrasi yang menunjukkan adanya pelemahan. Kegelisahan bermula dari adanya hasil rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dianggap melangkahi konstitusi. (Adzkie, 2024) Pada satu hari sebelumnya, 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi menghasilkan keputusan mengenai dua hal yaitu usia minimal calon kepala daerah dan ambang batas suara pencalonan menyesuaikan jumlah penduduk. Pada 21 Agustus, DPR menganulir putusan MK dan merevisi UU Pilkada. Kegelisahan dan bahkan amarah massa terarah pada penolakan atas revisi UU Pilkada yang dinilai menguntungkan dinasti Presiden Joko Widodo. (Adzkie, 2024; Diahwahyuningtyas & Nugroho, 2024) Revisi UU Pilkada tersebut ditengarai merupakan bagian dari proses politik yang dinilai menjadi landasan bagi putra bungsu dari presiden untuk dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah pada periode Oktober 2024. (Adzkie, 2024)

Kegelisahan itu menjadi dasar dari munculnya aktivisme sosial melalui media sosial dengan aksi mem-*posting* gambar dan video Peringatan Darurat Garuda Biru. Sejumlah besar netizen mengunggah visual dan video Garuda Biru di dua platform media sosial dan tidak hanya itu juga menyebarkannya melalui sejumlah WhatsApp Group pada 21 Agustus. Video dan visual yang pertama kali diunggah pada 21 Agustus siang di platform Instagram @indonesans, pada dua jam berikutnya diunggah oleh akun @najwashihab dan telah dibagikan 500.000 kali. Pada kurun waktu yang kurang lebih berdekatan, sejumlah akun mengunggah pernyataan sikap Garuda Biru di platform X. Terpantau bahwa protes peringatan darurat berawal dari akun @pundingin yang mengunggah video yang berasal dari akun *youtube EAS Indonesia Concept* yang beredar pada satu tahun yang lalu.

Berikut ini adalah visual Peringatan Darurat yang diunggah di platform Instagram dan X selama kurun waktu 21 hingga 24 Agustus 2024:



Gambar 1. Visual peringatan darurat Garuda Biru

Semakin beranjak sore hingga malam hari, suasana dalam ruang media sosial semakin ramai dengan visual Garuda Biru. Reaksi-reaksi yang muncul secara spontan, mulai mengindikasikan kegelisahan yang semakin kuat dan meneriakkan kemarahan. Peringatan Darurat tersebut disandingkan dengan tagar #KawalPutusanMK sebagai respon atas

tindakan DPR menganulir putusan MK terkait usia minimal calon kepala daerah dan ambang batas suara pencalonan. Ditengarai upaya untuk mengubah putusan MK terkait usia minimal berkaitan dengan upaya untuk memuluskan jalan secara legal-formal bagi Kaesang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode Oktober 2024. Kaesang yang merupakan putra bungsu dari Presiden yang berkuasa saat ini, berusia 29 tahun dan baru akan berusia 30 tahun yang merupakan batas usia minimal pada Desember tahun 2024 ini.

Konsolidasi mulai menampakkan wajahnya dalam ruang media sosial sejak 21 Agustus 2024 sore hingga malam hari dalam bentuk ajakan untuk melakukan aktivisme riil berupa unjuk rasa. Konsolidasi dilakukan melalui sejumlah WhatsApp Group di kalangan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Sebagai respon atas rencana aktivisme riil tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pendampingan hukum, telah memberikan beberapa saran dan nomor kontak jika terjadi hal-hal yang dirasakan memerlukan bantuan mereka. Tidak ketinggalan aparat penegak ketertiban sosial yaitu Polri juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi di beberapa titik yang dinilai rawan terutama di area sekitar Gedung DPR.

Dan akhirnya pada Kamis 22 Agustus, sejak pagi hari para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di berbagai kota besar di Pulau Jawa dan sejumlah elemen masyarakat lainnya, melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menaiki bus yang disewa maupun berangkat secara mandiri melalui beberapa titik dengan menggunakan kendaraan umum menuju gedung DPR sebagai titik tujuan utama. Mereka mendatangi Gedung DPR sebagai simbol dari bentuk pengawalan pada demokrasi.

Meluasnya aksi pada siang hari 22 Agustus merupakan hal yang tidak disangka, meskipun pasukan pengamanan dari Polri telah berusaha mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh. Aksi diikuti oleh sejumlah mahasiswa yang menggunakan jaket almamater.

Aksi unjuk rasa tersebut dapat diinterpretasi sebagai manifestasi harapan masyarakat pada hukum sebagai institusi yang otonom dan memiliki kepedulian pada kepentingan rakyat serta berpegang pada etika dan berintegritas. Pandangan bahwa hukum bersifat otonom, rasional dan liberal yang dijadikan pedoman ketika melaksanakan aksi bersumber dari pengalaman sejarah masyarakat di Eropa Barat. (Meyer, 2012) Hukum karenanya menjamin kebebasan, akuntabilitas terhadap kekuasaan dan kepastian hukum. Prinsip akuntabilitas ini merupakan sebuah prinsip yang bertujuan untuk menyingkirkan hambatan-hambatan seperti adanya intervensi dari sejumlah aktor negara.

Dari amatan pada sejumlah akun media sosial, adanya ajakan solidaritas untuk memaknai demokrasi yang dilemahkan memuncak dengan ajakan untuk aksi unjuk rasa yang disuarakan melalui media sosial dan digaungkan melalui sejumlah WhatsApp Group. Bahkan sempat muncul isu akan adanya rencana untuk membenturkan konflik hingga terjadi *chaos*.

3.2. Aktivisme mahasiswa dalam media sosial

Aktivisme mahasiswa yang muncul dalam arena media sosial merefleksikan kesadaran akan demokrasi yang membawa konsekuensi logis pada adanya partisipasi. Partisipasi dalam ruang public menjadi semakin dimungkinkan dengan adanya internet. Internet menurut Buckingham dan Willet mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam menyampaikan gagasan politik dengan perspektif berbeda. (Buckingham & Willett, 2006) Aktivisme sosial yang muncul dalam media sosial menunjukkan bagaimana warga dengan beragam gagasan, untuk mengembara dalam gagasan, nilai-nilai dan kepedulian sosial terkait dengan isu yang dianggap relevan bagi kepentingan masyarakat dalam konteks demokrasi.

Rheingold juga menjelaskan bahwa keberadaan internet mendorong partisipasi warga merupakan bagian dari proses demokratisasi. Dan partisipasi warga yang luas dalam ruang media sosial menunjukkan warna gagasan yang tidak seragam, meski Sebagian terbesar

mengarah kepada upaya untuk mempertanyakan dan mengkritik dinamika hukum yang diintervensi oleh kepentingan politik.

Adapun tagar (*hashtag*) yang disebarakan secara luas oleh warga melalui media sosial adalah sebagai berikut: #KawalPutusanMK, #TolakPilkadaAkal2an, #TolakPolitikDinasti dan #IndonesiaEmergencyDemocracy.

Paparan dalam bentuk tabel berikut ini dapat menunjukkan variasi wacana yang diangkat oleh masyarakat dalam ruang publik di media sosial:

Tabel 1. Suara yang berpusat pada gagasan untuk perubahan sosial

Kategori	Wacana
Demokrasi rusak	Ibu Pertiwi sedang tidak baik-baik saja Berjalan secara terang2an dan secara ugal-ugalan Selamatkan negeri Enough is enough Ga masuk akal mau merusak negara Raja Jawa Tukang kayu serakah Mulyono
Perusak demokrasi	DPR Kaesang Pak Lurah Maruknya minta ampun Pendukung beliau 2 periode
Menyelamatkan demokrasi	Lawan, jangan lengah Berdoa kepada Tuhan YME untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia Kawal sampai ketok palu Lawan jangan lengah
DPR	Mengacak-acak UU demi nepotisme DPR lebih membela Kaesang daripada rakyat Indonesia Harusnya mewakili rakyat tetapi dalam kenyataannya tidak Menganulir keputusan MK Diharapkan mempertimbangkan untuk menghormati putusan MK
Presiden	Melemahkan KPK UU KPK diganti Gibran terus Kaesang Semua partai dia kuasai
Rakyat	Stop bodohi rakyat Lebih memilih Kaesang daripada rakyat Rakyat bergerak
Partai politik	Semua partai sudah tersandera Gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora

Dari kategorisasi yang muncul dalam sejumlah akun di dua platform X dan Instagram, terdapat kategori demokrasi, di mana terdapat tiga subkategori yang berkaitan dengan demokrasi. Ketiga sub kategori tersebut adalah demokrasi rusak, perusak demokrasi dan

menyelamatkan demokrasi. Kategori berikutnya memperlihatkan konteks biner, Pemerintah versus Rakyat, di mana di satu terdapat sub kategori mereka yang merepresentasi kekuasaan, yaitu Presiden dan DPR. Di sisi lain adalah subkategori mereka yang didefinisikan sebagai korban dari praktik kekuasaan, baik rakyat maupun partai politik.

Dari kategori demokrasi kita melihat terdapat tiga subkategori yang saling terkait, pertama adalah demokrasi rusak yang dirasakan suasananya oleh warganet, dengan mengatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sebagaimana terlihat dari situasi yang dideskripsikan sebagai berjalan secara terang-terangan dan ugal-ugalan bertentangan dengan konstitusi. Dalam teks, warganet mendeskripsikan pengalaman subjektif mereka terkait dengan situasi politik yang menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat otonom dan hal tersebut terjadi karena intervensi akibat adanya kepentingan politik sebagaimana dikuatkan oleh penjelasan dari dua orang narasumber. Hal tersebut berdampak pada deskripsi tekstual yang menyebutkan tentang tindakan ugal-ugalan dan terang-terangan dengan melibatkan upaya menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi.

Pada satu titik, warganet juga mendeskripsikan secara tekstual mengenai siapa yang mereka definisikan sebagai perusak demokrasi. Perusak demokrasi menunjuk pada penguasa dan mereka yang menjadi pendukung dari penguasa yang ikut memilih presiden pada periode kedua. Penguasa didefinisikan secara luas pada presiden maupun DPR. Yang menarik, figur presiden di sini tidak hanya disebutkan dalam nama yang formal dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Joko Widodo, melainkan juga dengan nama Mulyono. Nama Mulyono ini dikenal secara luas selama beberapa bulan terakhir melekat pada figur yang sama yaitu Presiden Joko Widodo. Nama Mulyono ini adalah nama yang diberikan orangtuanya pada saat lahir, dan dalam perjalanan waktu berganti nama menjadi Joko Widodo. Tidak hanya berhenti sampai di situ, penjulukan kepada penguasa juga diberikan dengan nama olok-olok seperti tukang kayu serakah, di mana wacana tersebut diperkuat dengan wacana tentang penguasa yang keserakahannya dinilai berlebihan, atau diistilahkan warganet sebagai "maruknya minta ampun".

Deskripsi sedemikian menggambarkan alam pikiran warganet yang memiliki kekecewaan yang mengental kepada figur penguasa. Kekecewaan yang memuncak dalam aktivisme tekstual berbasis penjulukan yang bersifat negatif merupakan hasil secara akumulatif dari proses perjalanan demokrasi yang mengalami pelemahan secara sistematis melalui sejumlah lembaga negara yang mengalami intervensi politik.

Dan ketika deskripsi tersebut menjadi sebetuk wacana yang dinarasikan secara luas oleh sejumlah warganet, hal tersebut menjadi refleksi atas demokrasi di mata mereka carut-marut dan karenanya mereka menginginkan adanya perubahan substantif, mulai dengan mendorong DPR agar tidak membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pendukung presiden dua periode juga dinilai bertanggung jawab dalam merusak demokrasi menjadi wacana yang menarik untuk ditelaah, mengapa? Karena dengan demikian warganet memahami dan memaknai bahwa pelemahan dalam demokrasi tidak semata-mata disebabkan oleh satu figur atau lembaga negara tertentu saja, melainkan karena sikap para pendukung dari penguasa yang berakibat pada terjadinya ancaman pada demokrasi.

Ketika mendeskripsikan figur yang dinilai sebagai perusak demokrasi, sejumlah warganet juga menunjuk pada Kaesang, yang merupakan anak dari Joko Widodo. Nama Kaesang ini muncul sebagai wacana yang khas pada sejumlah akun karena dinilai terkait dengan upaya memuluskan jalannya untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon kepala daerah melalui DPR. DPR berupaya untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia minimal dalam pencalonan kepala daerah.

Dalam data sekunder yang diperoleh dalam sejumlah akun Instagram, kemarahan warganet terpicu oleh aktivitas Kaesang dan Erina Gudono yang merupakan anak dan menantu dari Presiden Joko Widodo yang diunggah di media sosial. Kemarahan itu muncul sebagai akibat dari unggahan foto Erina yang memuat perjalanannya ke Amerika Serikat

dengan menggunakan *private jet* yang ditengarai merupakan bagian dari gratifikasi dari sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura.

Dewan Perwakilan Rakyat dideskripsikan secara tekstual oleh warganet dalam beragam wacana akan tetapi salah satu yang mencolok dan berulang kali dinarasikan adalah tentang entitas DPR sebagai representasi atau wakil dari rakyat. Dengan demikian, demokrasi dimaknai secara sadar oleh warganet sebagai bagian inheren dalam perjalanan kebangsaan dan kewarganegaraan. Bahwa demokrasi menempatkan para wakil dari rakyat sebagai anggota dewan yang mulia, Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu, rakyat memiliki hak atas keberadaan para anggota DPR. Dan hal tersebut mendorong mereka untuk mengingatkan anggota dewan pada hakekat sebagai representasi dari rakyat. Dengan dasar pemaknaan tersebut mereka mengharapkan agar anggota dewan mendengarkan suara mereka.

Maka menjadi menarik ketika warganet menempatkan wacana tentang kekecewaan pada DPR karena tidak mewakili suara rakyat dan justru menempatkan intervensi politik dalam merumuskan kebijakan, yang salah satunya disuarakan dengan menyatakan semacam resistensinya pada keputusan untuk membela Kaesang dalam merumuskan upaya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada titik lain yang berseberangan, mereka mengungkapkan perlawanan dengan mengatakan bahwa rakyat tidak lagi bisa dibodohi dengan berbagai upaya politik.

Pada bagian lain, warganet mengangkat wacana mengenai partai politik yang dimaknai sebagai entitas yang tidak bisa bergerak leluasa dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan karena partai dalam hal ini sudah disandera dengan kepentingan-kepentingan dan manuver politik.

Pada table berikut ini, akan ditunjukkan wacana yang dihadirkan oleh warganet terkait dengan bagaimana aktivisme digital bertransformasi menjadi aktivisme riil dan fisik (*tangible*).

Tabel 2. Dari aktivisme digital menuju aktivisme unjuk rasa

Kategori	Wacana
Aliansi dalam aktivisme digital dan riil	Aliansi mahasiswa dan rakyat Indonesia Mahasiswa, buruh, masyarakat sipil dan lainnya
Aksi unjuk rasa	Ajakan untuk aktivisme riil dalam bentuk unjuk rasa Keterlibatan merupakan hak warganegara dan urgent utk dilakukan Jangan ragu Aksi bertujuan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi Konsolidasi Urgensi Lokasi di depan Gedung DPR
Tujuan dari aktivisme riil (unjuk rasa)	Menjaga kewarasan demokrasi Menjaga kebenaran Menghentikan pembusukan hukum dan demokrasi Kita paksa pemerintah untuk menjadi baik
Hak digital	Hak digital untuk berekspresi
Kejahatan	Ajakan demo bukan kejahatan

Dari paparan di atas terdapat beberapa kategori yang menarik terkait dengan siapa yang menjadi aktor dalam aktivisme riil tersebut, yaitu bukan terdiri dari satu elemen masyarakat, melainkan beberapa elemen mulai dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil lainnya. Dan mereka memaknai aktivisme tersebut dalam sebuah bentuk aliansi, dalam sebuah pertautan kolektif, demi kepentingan bersama, bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan juga oleh narasumber. Dalam teks yang disajikan pada bagian tabel sebelumnya, muncul wacana mengenai Ibu Pertiwi yang merupakan simbol metafora dari tanah air tempat lahirnya bangsa Indonesia. Wacana ini menguatkan pemaknaan tentang wacana aliansi yang diekspresikan dalam melakukan aktivisme riil ini.

Pada kategori berikutnya yang menarik adalah bagaimana aktivisme riil ini dimaknai, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kewarasan demokrasi, menjaga kebenaran, menghentikan pembusukan hukum dan demokrasi. Dengan demikian aktivisme digital yang digiring ke dalam ranah riil oleh warganet merupakan bentuk aktivisme yang dilandasi oleh tujuan menegakkan demokrasi.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa aktivisme ini merupakan jalan yang ditempuh untuk mendesak pemerintah untuk bertindak lebih baik dalam koridor hukum dan demokrasi. Menariknya adalah adanya pemaknaan yang unik dari warganet yang menegaskan bahwa mengajak untuk terlibat dalam aktivisme bukan merupakan tindak kejahatan.

3.3. *Aktivisme digital dan riil dalam konstruksi jaringan sosial*

Merujuk pada Juergen Habermas (1991) yang menjelaskan bahwa ruang publik merupakan ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik. Dari telaah tersebut kita dapat melihat bahwa dinamika yang terbentuk melalui kesadaran akan hak warga berkat Peringatan Darurat Garuda Biru dalam media sosial merepresentasikan konsep ruang publik dimana terjadi ruang dialog partisipatif diantara mereka yang terlibat dalam sebuah jaringan sosial.

Aktivisme daring dalam penelitian yang dilakukan oleh Greijdanus, Fernandes, Turner-Zwinkels, Honari, Roos, Rosenbusch dan Postmes memiliki banyak bentuk, mulai dari isyarat simbolis tentang sikap seseorang terhadap isu yang dipolitisasi hingga keterlibatan yang lebih kompleks (2020, 49) seperti nampak dalam peristiwa 21 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Greijdanus et.al (2020, 49) menjelaskan bahwa media sosial memfasilitasi aktivisme digital dalam tiga cara utama. Pertama, media sosial memungkinkan individu untuk mengekspresikan pengalaman dan pendapat, mengaitkannya dengan tujuan kolektif. Kedua, media sosial memungkinkan anggota komunitas daring untuk memberikan dukungan, menyelenggarakan kegiatan, dan menentang tanggapan negatif terhadap kegiatan mereka. Ketiga, media sosial memungkinkan orang untuk melibatkan orang lain di luar komunitas mereka untuk secara kolektif menegosiasikan realitas bersama yang baru dan menyebarkannya.

Merujuk pada penjelasan Greijdanus aktivisme digital yang terjadi menunjukkan bahwa setidaknya terjadi dua hal, yaitu bahwa media sosial memberi ruang bagi warga untuk mengekspresikan gagasan sekaligus mengajak orang untuk terlibat dalam upaya turun ke jalan, melakukan aktivisme riil dengan unjuk rasa.

Aktivisme digital yang dilakukan oleh berbagai elemen kelompok masyarakat sipil terutama pada kurun waktu 21 Agustus 2024 menampakkan dua hal sekaligus terkait dengan demokrasi, yang pertama adalah bahwa aktivisme digital berkat adanya tujuan kolektif mempersatukan warga sehingga mau melakukan aktivisme riil.

Kedua, berkat kuatnya jaringan sosial yang terbentuk diantara para warganet yang mempersatukan dalam sebuah tujuan kolektif atau tujuan bersama, mereka bertransformasi menjadi sebuah kapital sosial. Jaringan tersebut menurut Martti Siisiäinen dapat menumbuhkan kepercayaan antar individu (2000:4). Apalagi ketika teks yang

ditransmisikan ke dalam jagat media sosial melalui sejumlah akun yang memiliki jaringan pengikut (*followers*) yang jumlahnya besar dan kokoh dari segi kredibilitas seperti halnya akun Najwa Shihab. Di sini aspek trust atau kepercayaan warganet pada figure-figure tertentu yang juga menjadi kekuatan dalam kapital sosial, seperti Najwa Shihab menjadi elemen penguat yang mempersatukan aktivisme warganet.

Dalam hal ini kita sekaligus melihat bahwa penjelasan Putnam relevan ketika mengatakan bahwa demokrasi dalam praktiknya akan melibatkan kapital sosial, di mana kapital sosial ini akan memfasilitasi terjadinya koordinasi dan kerjasama demi tercapainya manfaat bagi setiap pihak yang terlibat.

Empat tahun yang lalu terjadi hal yang sama, melibatkan kapital sosial dengan basis jaringan sosial melalui akun media sosial. Empat tahun yang lalu pasca tindakan brutal yang dilakukan polisi dan mengakibatkan kematian George Floyd, muncul gerakan *#BlackLivesMatter*, yang muncul sebagai reaksi untuk melawan diskriminasi rasial. Gerakan ini memanfaatkan kekuatan media sosial untuk mengamplifikasi pesan melalui pemanfaatan platform seperti *Twitter* dan *Facebook* (Earl, Maher & Pan, 2022; Puspitasari, 2020, 15). Dan gerakan yang didorong oleh adanya pesan Peringatan Darurat Garuda Biru, tidak hanya berhenti di tingkat aktivisme digital tetapi sanggup merentang hingga aktivisme riil dengan unjuk rasa yang pada satu titik menjadi penanda demokrasi, dalam elemen partisipasi dan inklusi sosial, karena mereka yang terlibat tidak terbatas pada satu kelompok saja, melainkan beragam kelompok di beberapa kota besar di Indonesia.

4. Simpulan

Penelitian di atas menunjukkan beberapa hal menarik terkait dengan demokrasi yang berjalan dalam ruang digital. Media sosial menjadi ruang publik bagi setiap pihak yang ingin mengekspresikan gagasannya sekaligus menyampaikan kegelisahan dan harapannya tentang demokrasi yang dinilai mengalami pelemahan seturut dengan waktu akibat adanya intervensi kekuatan politik dalam lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan secara hukum.

Pemaknaan yang dihasilkan melalui *interactivity* dalam ruang media sosial menunjukkan lapisan yang menarik mulai dari bagaimana mereka mengidentifikasi seperti apa demokrasi di Indonesia di Indonesia dewasa ini, siapa yang menjadi perusak demokrasi, termasuk apa yang mereka harapkan dengan kemudian mentransformasikan aktivisme digital ke dalam aktivisme riil.

Terdapat sejumlah alasan yang mendasari mengapa transformasi ke dalam ruang riil terjadi, yaitu pertama karena adanya aktivisme digital dapat bertransformasi menjadi aktivisme riil apabila terdapat sejumlah prasyarat, pertama adanya disilusi terhadap pelemahan demokrasi, disilusi kumulatif menjadi motor penggerak aktivisme riil. Dan media sosial menjadi kanal untuk memobilisasi warganet agar bergerak menegakkan demokrasi dalam mengawal. Dan terdapat kekecewaan yang terjadi dalam suatu sekuens waktu tertentu dan adanya momen sejarah yang menyadarkan banyak orang bahwa bangsa ini sedang dirugikan melalui factor-faktor yang melemahkan demokrasi.

Kontribusi Penulis

Penulis berkontribusi penuh dalam penelitian ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari luar

Pernyataan Dewan Peninjau Etis:

Tinjauan etis dan persetujuan diabaikan untuk penelitian ini karena tidak ada data pribadi yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Jumlah informan adalah enam, dan wawancara terutama untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana bank makanan beroperasi di Indonesia, tidak ada informasi pribadi yang dikumpulkan.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan,

Open Access

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Referensi:

- Adzkia, A. (2024). *Ini Bukan Negara Milik Keluarga Tertentu*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/extra/gn1j45vx6z/protes_ruu_pilkada
- Buckingham, D., & Willett, R. (2006). *Digital Generations: Children, Young People, and the New Media* (1st ed.). Routledge.
- Dahlberg, L. (2001). The Internet and Democratic Discourse: Exploring The Prospects of Online Deliberative Forums Extending the Public Sphere. *Information Communication and Society*, 4(4), 615–633. <https://doi.org/10.1080/13691180110097030>
- Diahwahyuningtyas, A., & Nugroho, R. S. (2024). *Asal-usul Peringatan Darurat Indonesia Garuda Biru, Viral di Medsos*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/22/163000065/asal-usul-peringatan-darurat-indonesia-garuda-biru-viral-di-medsos?page=all>
- Earl, J., Maher, T. V, & Pan, J. (2022). The digital repression of social movements, protest, and activism: A synthetic review. *Science Advances*, 8(10). <https://doi.org/10.1126/sciadv.abl8198>
- Elson, C. & King, K. (2022). Views of democracy, egalitarianism and capitalism among millennials and gen Zs. *Wake Forest University Research Report*, April 2022
- Gadi, W., Segev, E., & Sheaffer, T. (2013). Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First. *International Journal of Press/Politics*, 18(2), 115–137. <https://doi.org/10.1177/1940161212471716>
- Goodwin, J. (2011). Why We Were Surprised (Again) by the Arab Spring. *Swiss Political Science Review*, 17(4), 452–456. <https://doi.org/10.1111/j.1662-6370.2011.02045>
- Greijdanus, H., Fernandes, CAM., Turner-Zwinkels, F., Honari, A., Roos, CA., Rosenbusch, H. & Postmes, T. 2020. "The psychology of online activism and social movements: relations between online and offline collective action." *Current Opinion in Psychology*. Vol. 35, p. :49–54
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. The MIT Press.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy* (3rd ed.). Polity Press.
- Holmes, D. (2005). *Communication Theory: Media, Technology, Society*. Sage Publications, Inc.
- Hoskyns, T. (2014). *The Empty Place: Democracy and Public Space*. Routledge.

- IDN Research Institute. (2024). *Indonesia Gen Z Report 2024*.
- Jian, IY., Chan, EHW., Xu, Y., & Owusu, E.K. 2021. "Inclusive public open space for all: Spatial justice with health considerations". *Habitat International* 118. www.elsevier.com/locate/habitatint
- Khondker, H. H. (2011). Role of the New Media in the Arab Spring. *Globalizations*, 8(5), 675–679. <https://doi.org/10.1080/14747731.2011.621287>
- Levinson, P. 2003. *Digital McLuhan: a guide to the information millenium*. London: Routledge
- Lim, M. "from activist media to algorithmic politics The Internet, social media, and civil society in Southeast Asia. Hansson, E & Weiss, ML. eds. 2023. *Routledge handbook of civil and uncivil society in Southeast Asia*, New York : Routledge, p. 25-42
- Lindén, M., Björklund, F., & Bäckström, M. (2016). What makes authoritarian and socially dominant people more positive to using torture in the war on terrorism?. *Personality and Individual Differences*, 91, 98-101. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.058>
- Madanipour, A., ed. 2010. *Whose Public Space? International case studies in urban design and development*. USA & Canada: Routledge
- Mehta, D. 2020. "National Media Coverage Of Black Lives Matter Had Fallen During The Trump Era — Until Now," <https://fivethirtyeight.com/features/national-media-coverage-of-black-lives-matter-had-fallen-during-the-trump-era-until-now/>
- Meyer, T. (2012). *Demokrasi Sosial dan Libertarian: Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Obradovic, S. Power, SA., and Sheehy-Skeffington, J. 2020. "Understanding the psychological appeal of populism." dalam *Current Opinion in Psychology*. Vol. 30, p. 125–131. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101454>
- Papacharissi, Z. (2010). *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Polity Press.
- Parkinson, JR. 2012. *Democracy and public space: the physical sites of democratic performance*. New York: Oxford University Press Inc.
- Prentice, D. & Paluck, EL. 2020. "Engineering social change using social norms: lessons from the study of collective action". *Current Opinion in Psychology* Vol. 35, p.:138–142. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.06.012>
- Pusdatin BPIP. (2021). *Hai Sobat Pancasila! Sudah Tahu Belum, Arti Lambang Pancasila, Makna dan Bunyinya, Berikut Ulasannya*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. <https://bpip.go.id/berita/hai-sobat-pancasila!-sudah-tahu-belum-arti-lambang-pancasila-makna-dan-bunyinya-berikut-ulasannya-->
- Puspitasari, 2020. "Luka Kemanusiaan yang Disembuhkan", Oetomo, BSD & Herjani, M. Ed. *Hidup menjadi cerita: Teknologi Informasi & Komunikasi sebagai Sarana untuk Menjahit Kembali yang Putus dan Terbelah*. Yogyakarta: Talenta Indonesia Mandiri
- Schaefer, RT. 2006. *Sociology: a brief introduction*. New York: McGraw-Hill International
- Siisiäinen, 2002. "Two concepts of social capital: Bourdieu vs. Putnam" I *International Journal of Contemporary Sociology* 40 (2): 183-204
- Wolfsfeld, G., Segev, E., & Sheaffer, T. (2013). Social media and the Arab Spring: Politics comes first. *The International Journal of Press/Politics*, 18(2), 115-137. <https://doi.org/10.1177/1940161212471716>

Biografi Penulis

Maria Puspitasari, Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta, 10430, Indonesia.

- Email: puspitasari11@ui.ac.id
- ORCID: N/A
- Web of Science ResearcherID: N/A
- Scopus Author ID: N/A
- Homepage: N/A